

SEKTOR RIIL-Yuliot

Investasi sebagai *Engine of Growth* dari Pertumbuhan Ekonomi

Quotes: “Yang perlu kita lakukan perbaikan untuk pembenahan daya saing ekonomi Indonesia adalah yang terkait dengan inefisiensi perekonomian Indonesia”

Sektor riil merupakan salah satu sektor yang terkena reperkusi ekonomi paling buruk dari pandemi COVID-19. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah-daerah dengan mobilitas tinggi seperti Jakarta menmpperlambat jalannya roda perekonomian. Aktivitas sehari-hari terhambat, pegawai-pegawai terkena PHK, serta iklim investasi juga melesu. Untuk mengatasi penurunan produktivitas di sektor riil ini, pemerintah mencoba melakukan pengembangan di berbagai bidang, salah satunya di bidang investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini disampaikan oleh Ir. Yuliot, M.M., Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM dalam Forum Indonesia Economic Outlook '21 (14/11).

Pandemi COVID-19 dan Dampaknya Bagi Dunia Investasi

Yuliot membuka pemaparan dengan sebuah *statement* bahwa investasi sejatinya adalah kegiatan yang sangat sensitif terhadap berbagai perubahan dan kondisi yang ada, sehingga penting untuk menjaga momentum dan meningkatkan kegiatan investasi di tengah pandemi ini. Ia juga menuturkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan sebuah insiden global yang menimpa lebih dari 200 negara, yang menghambat aliran permodalan dan produk dari luar negeri. Negara-negara yang menjadi sumber investasi Indonesia sendiri hampir semuanya mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan kedua 2020. Dampaknya, realisasi penanaman modal asing di Indonesia selama 2020 turun sebesar 5,1%, seiring dengan turunnya *Foreign Direct Investment* (FDI) global sebanyak 49%.

Pandemi COVID-19 juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan, dengan semua sektor mengalami pertumbuhan negatif, kecuali sektor pertanian. Aktivitas perdagangan juga mengalami penurunan, baik dari segi ekspor maupun impor. Meskipun demikian, pemerintah sedang berupaya untuk “menjalankan” kembali perusahaan-perusahaan yang terdampak pandemi, sehingga aktivitas ekspor dan impor dapat kembali berjalan dan menggerakkan perekonomian. Investasi merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan ini,

sebab investasi mempunyai *multiplier effect* yang mampu memberi dampak positif ke seluruh segi perekonomian.

Menarik investasi asing ke Indonesia di tengah pandemi bukanlah hal yang mudah. Tingkat FDI global sendiri telah anjlok pada tahun 2020 dan diproyeksikan masih akan menurun pada 2021, sehingga pemerintah harus berusaha ekstra keras untuk menarik investasi, ditambah lagi dengan banyaknya pesaing. Yuliot juga berharap adanya persaingan ini dapat mendorong Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pemberian insentif terhadap investasi, sehingga semakin banyak lagi investasi yang dapat diperoleh. Untuk meningkatkan citra Indonesia di mata investor global, pemerintah berupaya untuk memfasilitasi segala kegiatan investasi asing sembari menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri seperti investasi mangkrak, yang terkendala di segi teknis. Upaya ini, disertai dengan pemahaman terhadap kebutuhan investor itu sendiri, akan menjadi promosi positif bagi Indonesia untuk menarik kegiatan investasi di dunia global.

Dalam menarik FDI, menurut Yuliot, Indonesia harus mampu melihat sektor mana yang kira-kira mempunyai potensi untuk dikembangkan melalui investasi. Meski demikian, sektor-sektor tertentu yang mengalami kontraksi paling parah akibat pandemi juga perlu diperhatikan, seperti sektor energi dan transportasi penerbangan. Yuliot juga menyampaikan, perlu dilakukan pembenahan sehingga perusahaan di sektor ini juga dapat melakukan *recovery*, contohnya melalui fasilitasi pemerintah untuk restrukturisasi kredit perusahaan, pengadaan bahan baku, serta diversifikasi produksi. Salah satu contoh upaya ini yang telah berhasil adalah di sektor garmen, dengan diversifikasi produksi mengikuti permintaan global yang meningkat terhadap alat-alat kesehatan seperti masker, APD/baju hazmat, dan sejenisnya.

Selama pandemi COVID-19, banyak negara yang kebijakannya mengarah kepada tren deglobalisasi. Negara-negara menjadi lebih memprioritaskan *supply chain* dari dalam negeri, karena pandemi mengakibatkan terjadinya disrupsi terhadap *supply chain* global. Sebanyak 938 dari 1.000 perusahaan *Fortune 1000* sendiri mempunyai *supplier*/pemasok bahan baku yang berlokasi di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, tempat yang menjadi awal penyebaran virus COVID-19. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga membuat banyak perusahaan memindahkan basis produksinya dari Tiongkok, ditambah lagi Tiongkok memang mulai kehilangan daya saing sehingga perusahaan-perusahaan dunia mulai mengalihkan basis produksinya ke negara-negara lain di Asia, terutama negara-negara ASEAN.

Indonesia Masih Harus Berbenah

Kendati demikian, Yuliot beranggapan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Salah satu di antaranya yaitu tingkat ICOR (*Incremental Capital-Output Ratio*) Indonesia yang masih lebih tinggi dari negara-negara ASEAN lainnya, yang menunjukkan adanya inefisiensi investasi dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, indeks EoDB (*Ease of Doing Business*) Indonesia juga masih berada di peringkat ke-73 (Bank Dunia, 2020), sehingga diperlukan pembenahan di segi perizinan, perpajakan, perdagangan lintas batas, dan ketenagakerjaan. Indikator-indikator lainnya seperti harga tanah dan air, upah minimum, Indeks Persepsi Korupsi, dan kinerja logistik juga menunjukkan Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga.

Realisasi investasi Indonesia pada tahun 2020 sendiri mencapai Rp611,6 triliun, atau sebesar 74,8% dari target Rp817,2 triliun. Dalam jangka waktu empat tahun ke depan (2020-2024), pemerintah menargetkan investasi akan tumbuh menjadi Rp4.983,2 triliun, sebuah kenaikan sebesar 47,3% dari periode 2015-2019. Kendati berbagai hambatan yang dialami sekarang, Yuliot optimis bahwa target ini akan dapat dicapai, karena negara-negara investor juga sudah mulai mengalami pemulihan. Pemerintah juga menjalankan strategi peningkatan investasi dengan mendorong UMKM—yang berkontribusi terhadap 98% kegiatan usaha di Indonesia—untuk meningkatkan produksinya.

Sebagai penutup, Yuliot menjelaskan salah satu solusi yang sedang dijalankan pemerintah untuk mengembangkan iklim investasi di Indonesia, yaitu pengesahan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja (UU Ciptaker). Undang-undang yang terdiri dari 15 bab dan 186 pasal ini merupakan revisi sekaligus gabungan dari 77 undang-undang yang mengatur berbagai sektor. Di sektor riil sendiri, undang-undang ini mempermudah birokrasi perizinan usaha serta investasi, sehingga diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal asing. Pemerintah berharap adanya Undang-Undang Ciptaker ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia serta membawa Indonesia menuju transformasi ekonomi.